

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN
MASYARAKAT TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN
WILAYAH PESISIR OLEH DINAS PEMBINAAN POTENSI
MARITIM PANGKALAN UTAMA TNI AL VI DI PULAU
KODINGARENG LOMPO**

THE ANALYSIS OF PUBLIC AWARENESS COMMUNICATION
STRATEGIES ON ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT IN THE
COASTAL AREAS BY THE MARITIME POTENTIAL
DEVELOPMENT SERVICE OF THE SIXTH MAIN NAVAL
BASE IN KODINGARENG LOMPO ISLAND

**RAMLAN LANNI
E022201008**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN MASYARAKAT
TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR OLEH
DINAS PEMBINAAN POTENSI MARITIM PANGKALAN UTAMA TNI AL
VI DI PULAU KODINGARENG LOMPO**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Ilmu Komunikasi**

Disusun dan Diajukan Oleh

**RAMLAN LANNI
E022201008**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR OLEH DINAS PEMBINAAN POTENSI MARITIM PANGKALAN UTAMA TNI AL VI DI PULAU KODINGARENG LOMPO

Disusun dan diajukan oleh

RAMLAN LANNI

E022201008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **12 Desember 2022**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc

Nip. 195204121976031017

Ketua Program Studi

Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.

Nip. 196107161987021001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Arianto, S.Sos., M.Si

Nip. 197307302003121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, M.Si

Nip. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang Bertanda Tangan Di bawah ini:

Nama : RAMLAN LANNI

NIM : E022201008

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan pengambilalihan tulisan dan pemikiran dan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat) karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 12 Desember 2022



Yang Menyatakan

RAMLAN LANNI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat penyelesaian studi di Pasca Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih khususnya kepada orang tua atas doa-doanya dan petunjuknya selama penulis menyusun tesis ini. Di samping itu dengan hormat penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI, Aspotmar Danlantamal VI, Kadispotmar Lantamal VI serta seluruh Staf Spotmar dan Dispotmar Lantamal VI;
4. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univerisitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;

5. Dr. H. Muhammad Farid, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan juga selaku penguji yang banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini;
6. Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan diskusi bermanfaat selama penyusunan tesis;
7. Dr. Arianto, S.Sos., M.Si. sebagai pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikiran serta dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
8. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si selaku penguji yang memberikan masukan dan arahan terkait kesempurnaan tesis ini;
9. Dr. H. Muhammad Akbar, M.Si sebagai penguji yang juga telah memberikan masukan dan kritikan yang bermanfaat demi kesempurnaan penelitian ini;
10. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang berkenan memberikan ijin kepada penulis dalam mencari dan melengkapi data-data penelitian di ruang kerjanya;
11. Kepala Kelurahan Kodingareng dan seluruh masyarakat Kodingareng yang dengan hangat dan terbuka memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam mendukung penyusunan tesis ini;
12. Kepada seluruh Dosen-Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wejangan yang mendalam kepada penulis dan seluruh Mahasiswa Pasca Ilmu Komunikasi Angkatan 2020;

13. Kepada istriku tercinta Melda Reski yang selalu mendampingi dan memberikan semangat. Anak-anakku Varrel Wira Yudha, Kitara Flow Aisyah, Vivi Flowery Az Zahra, dan Ruby She Ramadani. Tanpa senyum dan kehadiran kalian tesis ini tidak akan selesai; dan

14. Kepada teman-teman Pasca Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Angkatan 2020, terima kasih atas kritik dan masukannya untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu masukan dan kritikan yang bersifat membangun tentu akan sangat bermanfaat bagi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu komunikasi kedepan. Terakhir semoga Allah Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta senantiasa melindungi dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 12 Desember 2022

RAMLAN LANNI

ABSTRAK

RAMLAN LANNI. *Analisis Strategi Komunikasi Penyadaran Masyarakat terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI di Pulau Kodingareng Lompo* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Arianto).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mengkaji tentang strategi komunikasi Dispotmar Lantamal VI dalam rangka penyadaran masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Fokus penelitian adalah analisis strategi komunikasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data bersumber dari 16 informan, yaitu 5 orang dari Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar masing-masing 1 orang, serta 9 orang masyarakat Pulau Kodingareng Lompo. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data dari informan, pengondensasian data dengan fokus kepada hal-hal penting terkait penelitian, penyajian data dalam bentuk eksplanasi, serta penarikan kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispotmar Lantamal VI menggunakan perencanaan komunikasi lima langkah berupa penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan sebagai bagian strategi komunikasi penyadaran untuk mendukung komunikasi sosialnya dengan masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo. Di samping itu, Dispotmar Lantamal VI menggunakan komunikasi persuasif dan partisipatif, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan generasi muda melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok serta kerjasama dengan insan media di luar TNI AL. Faktor-faktor pendukung keberhasilan komunikasi Dispotmar Lantamal VI di antaranya kesiapan personel dan kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan baik yang didukung oleh generasi muda dan tokoh masyarakat. Sementara penghambat keberhasilan komunikasinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat kesejahteraan masyarakat, kurangnya pengawasan dari pihak terkait, kurangnya fasilitas pembuangan sampah, mudahnya akses mendapatkan bahan bom ikan, dan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Analisis SWOT dalam penelitian ini kemudian memberikan gambaran kekuatan dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dispotmar Lantamal VI untuk menunjang keberhasilan program komunikasinya di Pulau Kodingareng Lompo.

Kata kunci: strategi komunikasi, Pangkalan Utama TNI AL VI, Pulau Kodingareng Lompo



ABSTRACT

RAMLAN LANNI. *The Analysis of Public Awareness Communication Strategies on Environmental Improvement in the Coastal Areas by the Maritime Potential Development Service of the Sixth Main Naval Base in Kodingareng Lampo Island* (supervised by Hafied Cangara and Arianto).

This research aims to describe and examine the communication strategy of the Maritime Potential Development Service of the Sixth Main Naval Base regarding the importance of preserving the environment. The research focus of the analysis of communication strategies and the factors affecting them. The data were collected through observation, interviews, and literature study obtained from 16 informants, consisting of five people from the Sixth Main Naval Base in Makassar, one informant from the Environmental Service, one person from the Fisheries and Agriculture Service of Makassar, and nine people from the Kodingareng Lampe Island. Data analysis used Miles and Huberman model with several stages, i. e. collecting data from informants, condensing data with a focus on important matters related to research, presenting data in the form of explanations, and drawing conclusions from research results. The results show that the Maritime Potential Development Service of the Sixth Main Naval Base uses a five-step communication plan in the form of research. They are research, plan, execute, measure, and report as the parts of the awareness communication strategy to support social communication with the people in Kodingareng Lampo Island. In addition, the Maritime Potential Development Service of the Sixth Main Naval Base uses persuasive and participatory communication, collaboration with stakeholders, approach to community leaders and the younger generation through interpersonal communication and group communication, and collaboration with members of the media outside the Indonesian Navy. The factors supporting the success of its communication are personnel readiness and a well-organized communication supported by the younger generation and community leaders. Meanwhile, the inhibiting factors of the successful communication are the level of community welfare, the lack of supervision from related parties, the lack of waste disposal facilities, easy access to fish bomb materials, and the presence of parties who take advantage of the situation to gain profit. Then the SWOT analysis in this research provides an overview of the strengths and opportunities that can be utilized by the Maritime Potential Development Service of the Six Main Naval Base to support the success of its communication program in Kodingareng Lampo Island.

Keywords: communication strategy, the Sixth Main Naval Base, Kodingareng Lampo Island



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
PENGAJUAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kajian Konsep	24
1. Konsep Tentang Komunikasi	24
2. Konsep Tentang Komunikasi Lingkungan	27
3. Konsep Perencanaan dan Strategi Komunikasi Penyadaran Masyarakat	35
4. Konsep Kesadaran Manusia terhadap Lingkungan	44
5. Konsep Perbaikan Lingkungan	49
B. Landasan Teori	61
1. Teori Komunikasi Lingkungan	61
2. Teori Keseimbangan (<i>Balance Theory</i>).....	62
3. Teori Komunikasi Konvergen (<i>Convergency</i>)	63
4. Model Perencanaan Komunikasi Lima Langkah	63

5. Analisis SWOT.....	64
C. Hasil Penelitian yang Relevan.....	65
D. Kerangka Pemikiran.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Teknik Penentuan Informan	73
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Hasil Penelitian	77
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1.1. Profil Singkat Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar.....	77
1.2. Sejarah Singkat Pangkalan Utama TNI AL VI.....	81
1.3. Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI.....	85
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dispotmar Lantamal VI	86
1.5. Sasaran dan Prioritas Program Dispotmar Lantamal VI..	87
1.6. Komunikasi Sosial Dispotmar Lantamal VI sebagai Bagian Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pesisir	89
1.7. Keberhasilan Komunikasi Dalam Penyadaran Masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo adalah Usaha Bersama Dispotmar Lantamal VI dengan Seluruh Stake Holder dan Masyarakt.....	97
1.8. Gambaran Sejarah, Kehidupan Masyarakat dan Lingkungan Pesisir di Pulau Kodingareng Lompo.....	99
2. Gambaran Hasil Wawancara	105

2.1. Strategi Komunikasi Dispotmar Lantamal VI Dalam Rangka Menyadarkan Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo tentang Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan.....	105
2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Komunikasi Dispotmar Lantamal VI dalam Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo terhadap Pentingnya Menjaga Lingkungan Pesisir.....	114
B. Pembahasan.....	136
1. Strategi Komunikasi Dispotmar Lantamal VI Dalam Rangka Menyadarkan Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo Tentang Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan.....	136
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Komunikasi Dispotmar Lantamal VI dalam Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo terhadap Pentingnya Menjaga Lingkungan Pesisir.....	147
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1. Luas Perairan laut, garis pantai, dan pulau Indonesia.....	3
Tabel 1.2. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Selatan	9
Tabel 1.3. Kondisi Terumbu Karang Beberapa Pulau di Makassar	10
Tabel 1.4. Alat Tangkap Ikan Setiap Musim Nelayan Kodingareng	11
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Lantamal VI.....	81
Bagan 4.2. Struktur Organisasi Dispotmar Lantamal VI	89
Tabel 4.1. Tabel Matriks Wawancara	123
Bagan 4.4. Strategi Komunikasi Dispotmar Lantamal VI	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Terumbu karang yang kondisinya sangat baik.....	7
Gambar 1.2. Terumbu karang yang rusak di Makassar	7
Gambar 1.3. Sampah di Pantai Pulau Kodingareng Lompo	13
Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman	76
Gambar 4.1. Logo Pangkalan Utama TNI AL VI.....	77
Gambar 4.2. Lokasi Lantamal VI Makassar.....	80
Gambar 4.3. Pulau Kodingareng Lompo dilihat dari citra satelit	100
Gambar 4.4. Jarak Kota Makassar ke Pulau Kodingareng Lompo	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyadaran merupakan proses, cara, dan langkah penting dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik. Penyadaran terhadap masyarakat (*public awareness*) yang sifatnya berkelanjutan (*sustainable*) akan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, proses penyadaran masyarakat harus didukung dengan langkah-langkah strategis agar tujuan penyadaran tersebut dapat tercapai.

Kurangnya kesadaran manusia khususnya kesadaran terhadap lingkungan tentu akan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan *destructive* sehingga terjadi kerusakan lingkungan dimanamana. Saat ini isu tentang kerusakan lingkungan banyak terjadi di negara-negara berkembang sebagaimana yang ditulis oleh Neolaka (2008) dalam bukunya tentang kesadaran lingkungan, bahwa dewasa ini negara-negara berkembanglah yang sangat menderita karena kerusakan lingkungan akibat tekanan hidup dan kemiskinan. Negara-negara berkembang juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sekali, sehingga turut mendorong rusaknya lingkungan hidup.

Maraknya kerusakan lingkungan dewasa ini harus menjadi perhatian ekstra bagi *stake holder* guna mengurangi dampak lingkungan di kemudian hari, sehingga diperlukan adanya tindakan penyadaran kepada

masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyadaran masyarakat membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat yang menjadi sasaran penyadaran. Dengan komunikasi yang baik maka pesan-pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh penerima pesan/komunikasikan sehingga akan menimbulkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau akan terbentuk kesadaran bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak baik dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Everett M. Rogers dalam Cangara (2019) bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Oleh karena itu, dari penjelasan Rogers tentang komunikasi tersebut tentu bisa pula dianggap sebagai sebuah usaha untuk mengubah masyarakat yang tidak sadar menjadi sadar.

Komunikasi untuk penyadaran masyarakat khususnya terhadap kesadaran tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di darat, di udara, maupun di laut perlu dilakukan secara berkesinambungan karena sampai saat ini tindakan over eksploitasi masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kerusakan lingkungan di Indonesia tidak hanya terjadi di daratan, tapi juga di laut, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan dengan

kerusakan lingkungan karena pesisir banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan maupun masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan dan pesisir karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Garis pantai Indonesia adalah garis pantai sepanjang 95.186 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km. Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui secara internasional, sebagaimana yang tertera dalam UNCLOS tahun 1982. Setelah pengakuan tersebut, Indonesia melakukan ratifikasi melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut. Data UNCLOS 1982, menyatakan bahwa luas laut Indonesia sebesar 5,9 juta km², dengan 3,2 juta km² perairan teritorial serta 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE. Kondisi ini menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, (Subagiyo, dkk 2017).

Tabel 1.1. Luas Perairan laut, garis pantai, dan pulau Indonesia

Uraian	Luas Wilayah (km²)
Luas Laut Indonesia	5,8 juta km ²
Luas Perairan Kepulauan	2,3 juta km ²
Luas Perairan Teritorial	0,8 juta km ²
Luas Perairan ZEE Indonesia	2,7 juta km ²
Panjang Garis Pantai Indonesia	95.186 km
Jumlah Pulau	17.504 pulau
Pulau Sudah Bernama	8.651 pulau
Pulau Belum Bernama	8.853 pulau
Pulau yang telah Diverifikasi	9.842 pulau
Jumlah Pulau yang sudah didaftarkan ke PBB	4.981 pulau

Sumber: *Dirjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Di sepanjang garis pantai terdapat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya dengan sumber daya alam. Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (*vulnerable*) terhadap gangguan menurut Hadi (2004) dalam Kismartini & Bungin (2019). Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir dipicu karena adanya berbagai kegiatan, seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, penangkapan ikan, pertanian, pariwisata, pola hidup masyarakat pesisir, dan lain-lain.

Wilayah pesisir, pada umumnya didefinisikan sebagai pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian yang dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin. Adapun ke arah laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Hadi, 2004; Undang-Undang No. 27 Tahun 2007) dalam Kismartini & Bungin (2019).

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat besar. Sumber daya alam hayati berupa hasil perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam non-hayati berupa hasil tambang dan minyak bumi serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan nasional. Namun demikian, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan

pembangunan di wilayah pesisir, serta banyaknya pihak yang berkepentingan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir juga semakin meningkat. Kondisi ini tentu akan mengancam kelangsungan ekosistem dan mengancam keberlanjutan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam pesisir tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di wilayah pesisir menyebabkan ancaman terhadap keberadaan wilayah pesisir yang semakin besar. Hal ini berdampak pada eksploitasi sumber daya pesisir secara besar-besaran, khususnya wilayah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sumber daya pesisir merupakan komoditas yang terbatas, sementara terdapat banyak pihak yang saat ini berlomba-lomba untuk memanfaatkannya. Tata ruang wilayah pesisir yang tidak diperhatikan, pemanfaatan sumber daya pesisir yang berlebihan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang bias, serta rendahnya partisipasi masyarakat akan mengerucut pada pengelolaan pesisir yang kurang optimal (Nurdin, 2010) dalam Subagiyo, dkk (2017).

Keadaan wilayah pesisir di negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah paradoks, dalam hasil penelitian yang berjudul "*Hard Habits To Break: Investigating Coastal Resources Utilization and Management System in Sulawesi Indonesia*", oleh Idrus (2009) dalam Kismartini & Bungin (2019) dinyatakan bahwa banyak komunitas pesisir memiliki sumber daya alam yang kaya tetapi masyarakatnya miskin. Menurut Idrus, hal ini terjadi karena institusi formal

tidak mampu mempromosikan pengelolaan sumber-sumber daya alam secara efektif untuk kemakmuran rakyat melalui kebijakan yang diambilnya.

Pengelolaan wilayah pesisir memang menghadapi suatu keadaan yang rumit karena banyak sekali aktor yang berkepentingan di wilayah pesisir, sebagaimana dikemukakan oleh Hovik & Stokke (2007: 940-941)

“Coastal zone management is described as a complex management situation, with numerous actors, with different interests, world views, values and goals. In addition, there are asymmetric division of power and dependencies between the different actors.”

Banyaknya sektor maupun pihak yang mempunyai kepentingan pada pembangunan wilayah pesisir membuat kompleksnya pengelolaan wilayah pesisir, beberapa kebijakan bersifat saling tumpang tindih bahkan sering bertabrakan, sehingga kerugian yang sangat besar telah dirasakan oleh masyarakat, (Kismartini & Bungin; 2019). Pembangunan di sekitar pesisir akan memberikan dampak ekologis yang signifikan tatkala kebijakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan aspek lingkungan pesisir. Beberapa permasalahan pesisir yang umumnya dihadapi saat ini, diantaranya adalah kerusakan mangrove, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran air laut. Kerusakan di wilayah pesisir tersebut merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dari pihak yang menjalankan pembangunan dan masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi lingkungannya karena mengeksploitasi sumber daya alam pesisir yang tidak ramah lingkungan, contohnya praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) karena menggunakan bom, bahan peledak, dan bus.



Gambar 1.1. Terumbu karang yang kondisinya sangat baik



Gambar 1.2. Terumbu karang yang rusak di Makassar

Dampak langsung dari penggunaan bahan peledak ini akan merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelempar bahan peledak. Data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitas bahan peledak seberat 2.000 (dua ribu) gram pada praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 (dua belas koma lima puluh enam) meter persegi karang. Selain itu, dapat terjadi kematian ikan target dan ikan nontarget, berikut *juvenile* dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak yang bersifat destruktif. Sedangkan dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal (FAO, 2009). Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang, (Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023).

Sementara praktik penangkapan ikan dengan bahan beracun/bius akan berdampak lebih parah dari bom ikan. Hal tersebut terjadi karena titik penyemprotan untuk mendapatkan ikan memperhatikan arus air sehingga racun lebih banyak mengenai bagian tubuh karang. Karang bercabang (*branching coral*) banyak dipatahkan untuk memperoleh ikan yang berukuran kecil. Sedangkan pada penggunaan bahan peledak, karang dapat hancur namun masih memiliki kesempatan untuk hidup

kembali, (Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023). Data kerusakan terumbu karang khususnya di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Selatan

NO.	LOKASI	SITE	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	JELEK
1	Kota Makassar	14	0	0	4	10
2	Pangkep	15	1	2	7	5
3	Selayar	12	0	0	6	6
4	Kapoposang	13	0	6	7	0
5	Taka Bonerate	12	0	0	3	9
	Total	66	1	8	27	30
	Persentase		1%	12%	41%	45%

Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang khususnya di Wilayah Sulawesi Selatan sudah sangat parah. Bisa dilihat bahwa hanya 1% terumbu karang yang kondisinya sangat baik dari 66 situs, sementara 45% kondisinya jelek. Untuk wilayah Makassar sendiri, data di atas menunjukkan bahwa dari 14 situs terumbu karang yang ada, 10 diantaranya dalam kondisi jelek. Kerusakan terumbu karang di perairan Makassar tersebar di sekitar pulau-pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Bone Tambu, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae dan Pulau Kayangan dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Berikut data kerusakan terumbu karang dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2018 s.d. 2020 dimana tingkat kerusakan

terumbu karang diamati pada kedalaman 3 meter dan 10 meter dan pengukuran kerusakan terumbu karang dapat diketahui dengan mengukur persen karang hidup, karang mati, alga, abiotic dan faktor lain.

Tabel 1.3. Kondisi Terumbu Karang Beberapa Pulau di Makassar

NO	NAMA PULAU	KONDISI TERUMBU KARANG	
		Kedalaman 3 Meter	Kedalaman 10 Meter
1.	Barrang Lompo	Rusak Berat	Rusak Sedang
2.	Samalona	Rusak Berat	Rusak Sedang
3.	Kodingareng Lompo	Rusak Berat	Rusak Sedang
4.	Barrang Caddi	Rusak Sedang	Rusak Berat
5.	Bonetambung	Baik	Rusak Berat

Sumber: Laporan DLH Makassar dan DPP Makassar, 2018 s.d. 2020

Secara garis besar tabel di atas menunjukkan kondisi terumbu karang di beberapa pulau di Makassar dan ini akan berisiko secara langsung bukan hanya bagi lingkungan namun akan berpengaruh juga bagi kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang karena terumbu karang akan terus berkurang atau bahkan habis. Bila tidak ada terumbu karang maka hewan laut tidak memiliki tempat berkembang biak sehingga mengancam kelestariannya. Jika ikan berkurang, maka nelayan akan berkurang pula pendapatannya.

Jika dilihat pada tabel di atas, tiga pulau di Kecamatan Sangkarrang yakni Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Kodingareng Lompo mengalami kerusakan terumbu karang pada level sedang dan berat. Hal ini tentunya diakibatkan oleh teknik penangkapan ikan yang dipraktikkan oleh para nelayan. Menurut laporan tim penyuluh dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tahun 2021 disebutkan bahwa di

setiap musim tangkap ikan nelayan-nelayan khususnya dari Pulau Kodingareng Lompo menggunakan bom ikan, bagan, jaring, pukot, dan *speargun*. Datanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4. Alat Tangkap Ikan Setiap Musim Nelayan Kodingareng

NO.	JENIS IKAN	ALAT TANGKAP	BULAN TANGKAP														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Teri	Bagan, Jaring & Bom															
2.	Layang	Bagan, Jaring & Bom															
3.	Sibula	Bagan, Jaring & Bom															
4.	Cumi	Bagan, Bom															
5.	Tongkol	Bagan, Bom															
6.	Sunu	Bagan, Bom															
7.	Tenggiri	Pancing, <i>Speargun</i>															
8.	Selar	Pukat, Bom															
9.	Kembung	Pukat, Bom															
10.	Peperek	Jaring, Bagan															

Sumber: Laporan DPP Makassar, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa memang setiap musim tangkap ikan para nelayan khususnya di Pulau Kodingareng Lompo selalu menggunakan bom ikan sebagai salah satu alat tangkapnya, bisa dibayangkan seberapa besar kerusakan terumbu karang yang ditimbulkannya. Selain itu, menurut Data Hasil Studi *Destructive Fishing* di Spermonde, DWF Indonesia 2003 menjelaskan bahwa Perairan Pulau

Kodingareng Lompo menjadi salah satu lokasi penangkapan ikan dengan metode destruktif dan nelayan dari Pulau Kodingareng Lompo merupakan nelayan yang berperan serta dalam pemboman ikan di Perairan Kodingareng, Langkae dan di Kepulauan Tanakeke . Hingga saat ini pembom ikan yang berasal dari Pulau Kodingareng Lompo masih marak dengan banyaknya nelayan dari pulau tersebut yang berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan praktek *destructive fishing*. Contohnya, pada bulan Juni 2021, Polda Sulsel menangkap delapan nelayan pengguna bom ikan di perairan Sulsel, empat diantaranya berasal dari Pulau Kodingareng (Faisal Mustafa, Juni 2021).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain kerusakan mangrove dan terumbu karang, pencemaran air laut juga menjadi salah satu faktor rusaknya lingkungan pesisir. Pencemaran dapat disebabkan oleh makhluk hidup, energi, zat, dan atau komponen lain yang tidak sengaja dan/atau sengaja masuk ke dalam lingkungan laut, yang biasanya merupakan limbah atau buangan aktivitas penduduk yang berada di daratan.

Pencemaran air laut juga menjadi isu penting di pulau Kodingareng Lompo karena masyarakatnya masih membuang sampah ke laut. Menurut Syahid, dkk (2018) bahwa “Kesadaran warga Pulau Kodingareng Lompo untuk mengelola sampah dengan baik masih rendah, sampah masih dibuang di laut, tidak ada tempat pembuangan akhir sampah untuk masyarakat di pulau dan Pola Hidup sehat masyarakat yang masih rendah”.

Gambar berikut menggambarkan kondisi pantai di beberapa titik di Pulau Kodingareng Lompo.



Gambar 1.4. Sampah di Pantai Pulau Kodingareng Lompo

Membuang sampah di pinggir laut sepertinya sudah menjadi kebiasaan penduduk di Pulau Kodingareng Lompo dan tidak menutup kemungkinan kebiasaan ini juga terjadi di pulau-pulau lain. Sampah yang berserakan di pantai akan sangat berbahaya bagi lingkungan khususnya bagi ekosistem di laut karena sampah ini akan menimbulkan pencemaran yang dampaknya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Dalam Laporan Kajian Kualitas Air pada Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau

Kecil Kota Makassar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Makassar bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang mengukur kualitas air laut dengan menggunakan Standar Baku Mutu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air pada 12 lokasi diketahui bahwa kondisi perairan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- Parameter warna status normal.
- Parameter Total Suspended Solid melewati ambang batas di Bonetambung, Lumu-lumu, Langkai, Lanjukang, Kodingareng Keke, Kodingareng Lompo, Barrang Caddi, Lae-lae, Gusung, Kayangan, Tanjung Bayang, Belakang Transmall, CPI, MGH, Untia, PT. Kima, Muara Sungai Tallo, PT. IKI, PT. EASTERN, Pelabuhan Soeta.
- Parameter Amoniak melewati ambang batas di Bonetambung, Barrang Caddi, CPI, MGH, Untia, PT. Kima, Muara Sungai Tallo dan PT. IKI.
- Parameter Oksigen terlarut memenuhi baku mutu di semua lokasi pengamatan.
- Parameter Nitrat melampaui baku mutu di Tanjung Bayam, PT. Kima, Gusung, Kayangan, Bonetambung, Barrang Caddi, Belakang Transmall, MGH, Lae-lae, Untia, Muara Sungai Tallo, dan CPI.

- Parameter Ph memenuhi baku mutu di semua lokasi pengamatan.
- Parameter Fenol melampaui baku mutu untuk semua stasiun air sumur.
- Parameter BOD5 melampaui baku mutu di Bonetambung, Barrang Caddi, Lae-lae, Gusung, Kayangan, Tanjung Bayang, Belakang Transmall, CPI, MGH, Untia, PT. Kima dan Muara Sungai Tallo.
- Parameter Kadmium melampaui baku mutu di Tanjung Bayang, Belakang Tansmall, CPI, MGH, Untia, PT. Kima, Muara Sungai Tallo, PT. IKI, PT. EASTERN dan Pelabuhan Soeta.
- Parameter Khrom melampaui baku mutu di Bonetambung, Barrang Caddi, Lae-lae, Gusung, Kayangan, Tanjung Bayang, Belakang Transmall, CPI, MGH, Untia, PT. Kima dan Muara Sungai Tallo.
- Parameter Raksa, Seng, Tembaga, Timbal, E Coliform memenuhi baku mutu di semua lokasi pengamatan.
- Parameter MPN Coliform melampaui baku mutu di Untia, Lae-lae, Gusung, MGH, CPI, Muara Sungai Tallo, Belakang Transmall, Barrang Caddi, Tanjung Bayang, PT. IKI, Bonetambung.

Dari kajian di atas dapat dilihat bahwa Parameter Total Suspended Solid melewati ambang batas di Pulau Kodingaren Lompo dan dari hasil analisis kondisi kualitas air yang melampaui baku mutu menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Makassar dan FIKP Unhas Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena tingginya aktifitas baik itu pemukiman, industri, kegiatan pembangunan, transportasi laut dan sampah menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masuknya limbah ke dalam perairan laut yang kemudian berdampak pada tingginya kandungan konsentrasi parameter kualitas air. Untuk saat ini menurut hasil pengkajian DLH Makassar dan FIKP Unhas diketahui bahwa air laut di Makassar dalam status tercemar ringan. Oleh karena itu, sebelum pencemarannya menjadi berat perlu adanya langkah konkrit berupa kegiatan-kegiatan penyadaran masyarakat oleh pemangku kepentingan bekerjasama dengan masyarakat.

Menyadarkan dan mengubah sikap masyarakat pulau dan pesisir secara umum dan khususnya di Pulau Kodingareng Lompo tentu bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan proses, karena masyarakat di sana sudah bertahun-tahun melakukan kegiatan yang disadari atau tidak disadari merusak lingkungan. Sehingga proses penyadaran masyarakat membutuhkan strategi salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik agar masyarakat menyadari bahwa mereka adalah bagian dari lingkungannya, masyarakatlah yang membutuhkan lingkungan dan bukan lingkungan yang membutuhkannya.

Penyadaran masyarakat pesisir dan pulau dalam bentuk pembinaan masyarakat maritim dan pembinaan desa pesisir merupakan salah satu tugas dari TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 34 Pasal 9 tentang tugas TNI AL yang kelima yaitu “Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut”. Tugas TNI AL bukan hanya sebagai komponen utama pertahanan di laut, namun juga mempunyai wewenang dalam pemberdayaan wilayah laut dimana wilayah laut mencakup pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tugas-tugas pembinaan wilayah pesisir adalah domain Dispotmar (Dinas Pembinaan Potensi Maritim). Dispotmar melaksanakan tugas sebagai implementasi dari tugas TNI AL dalam memberdayakan potensi kelautan. Dispotmar merupakan badan yang menyelenggarakan fungsi dan kegiatan pembinaan potensi maritim yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim, nilai-nilai luhur/kearifan lokal bidang maritim, serta dinamisasi pembangunan kelautan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat maritim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pulau Kodingareng Lompo yang secara geografis berada pada posisi 119°19'48" Bujur Timur dan 05°02' 48" Lintang Selatan termasuk dalam wilayah binaan Dispotmar Lantamal VI, sehingga Dispotmar Lantamal VI memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyadaran masyarakat di pulau tersebut. Pembinaan masyarakat dengan

fokus pada usaha penyadaran masyarakat untuk mengajak masyarakat pulau Kodingareng Lompo agar memahami arti pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dengan mengedepankan komunikasi efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terdapat teknik komunikasi yang dikenal dengan nama Komunikasi TNI yang disingkat dengan Komsos TNI. Teknik komsos ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI sebagai bentuk usaha untuk merangkul dan mempengaruhi masyarakat. Komsos TNI akan efektif dengan membuat perencanaan komunikasi dan strategi komunikasi yang matang serta mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi target.

Dispotmar Lantamal VI dalam usaha menyadarkan masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo dengan teknik komsos TNI yang dimiliki serta perencanaan dan strategi komunikasi yang telah disusun perlu mengedepankan komunikasi yang baik dan persuasif serta berorientasi kepada lingkungan yang dikenal dengan Komunikasi Lingkungan, dimana menurut Flor & Cangara (2018) komunikasi lingkungan merupakan penggunaan pendekatan, prinsip, strategi dan teknik-teknik komunikasi untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Ringkasnya, komunikasi lingkungan adalah pertukaran informasi yang disengaja baik dalam bentuk pengetahuan maupun dalam bentuk kebijakan lingkungan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa komunikasi penyadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan di Pulau Kodingareng Lompo penting untuk diteliti dan dikaji karena sebagai berikut :

1. Masyarakat Pulau Kodingareng yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan menggunakan teknik tangkap ikan dengan bom/bahan peledak dan bus (*destructive fishing*) sehingga mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang di area Pulau Kodingareng maupun di luar area Pulau Kodingareng.
2. Masyarakat Pulau Kodingareng masih membuang sampah ke laut sehingga akan menyebabkan pencemaran air laut. Hal ini akan berdampak buruk bagi biota laut. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengonsumsi ikan dari laut.
3. Komunikasi penyadaran oleh Dispotmar Lantamal VI harus dilakukan agar terbentuk kesadaran masyarakat di Pulau Kodingareng tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sehingga kerusakan lingkungan tidak berlanjut.

Oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan riset berjudul **“ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR OLEH DINAS PEMBINAAN POTENSI MARITIM PANGKALAN UTAMA TNI AL VI DI**

PULAU KODINGARENG LOMPO". Penelitian ini dianggap penting karena akan memberikan gambaran jelas tentang komunikasi personel TNI AL dalam hal ini Dinas Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat di Pulau Kodingareng terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang relevan yaitu penelitian oleh Yasir, dkk., (2020), berjudul "Model Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kabupaten Bengkalis", penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan merupakan komponen penting dalam sebuah keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove. Penelitian oleh Adhi Iman Sulaiman, dkk., (2016), berjudul "Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran", penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa, sehingga masyarakat terlibat dalam membangun desa. Penelitian oleh Mekonnen Hailemariam Zikargae (2018) yang berjudul *Analysis of environmental communication and its implication for sustainable development in Ethiopia*. Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh otoritas perlindungan lingkungan negara bagian Amhara di Ethiopia guna mengurangi krisis lingkungan yang terjadi di Ethiopia. Penelitian relevan yang lain adalah penelitian oleh Titi Antin, dkk., (2017) yang berjudul "Literasi Sampah Berbasis Komunikasi Pembangunan di Kabupaten

Bantul” Penelitian ini menganalisis tentang pendekatan komunikasi pembangunan untuk mengajak masyarakat Bantul dalam rangka berpartisipasi mengelola sampah dengan baik sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga menuju Bantul Bersih Sampah 2019 dan Indonesia Bebas Sampah 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Dispotmar Lantamal VI dalam rangka menyadarkan masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir agar tidak terjadi kerusakan lingkungan berkelanjutan ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat keberhasilan komunikasi yang dihadapi Dispotmar Lantamal VI dalam upaya membangun kesadaran masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Dispotmar Lantamal VI dalam menyadarkan masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir agar tidak terjadi kerusakan lingkungan berkelanjutan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan komunikasi yang dihadapi Dispotmar Lantamal VI dalam upaya membangun kesadaran masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dispotmar Lantamal VI dalam rangka membangun kesadaran masyarakat khususnya di Pulau Kodingareng Lompo agar tidak terjadi kerusakan lingkungan berkelanjutan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian mendatang dengan desain penelitian serupa maupun penelitian berbeda serta memberi masukan kepada pihak

berwenang agar mempertimbangkan dan menyusun strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Konsep Tentang Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah sebuah proses dan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Hafied Cangara dalam bukunya *Pengantar Ilmu Komunikasi* (2019) menjelaskan bahwa pada tahun 1981 Rogers bersama D. Lawrence Kincaid mengembangkan definisi komunikasi yakni :

“Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa proses komunikasi akan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Menurut Ariyanto (2021) disebutkan bahwa komunikasi sebagai proses karena komunikasi ditandai adanya kegiatan berupa tindakan, perubahan, pertukaran, dan perpindahan pesan. Komunikasi memiliki karakter yang dinamis, interaktif, transaksional,

berlangsung dalam konteks ruang dan waktu, serta konteks sosial masyarakat.

Di samping itu menurut Ariyanto (2021) komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, pernyataan seseorang kepada orang lain yang berarti bahwa komunikasi adalah saling memberikan pemahaman, melibatkan hubungan antar manusia atau dikenal istilah *human communication* (komunikasi antar manusia). Komunikasi dimulai saat sumber (komunikator) mengirimkan informasi, ide, simbol-simbol, kata-kata, gambar dan bentuk lainnya. Komunikasi melibatkan pengirim (sumber/komunikator) dan penerima. Komunikasi biasanya melibatkan pertukaran sinyal kepada penerima, seperti sinyal verbal, non-verbal (gerak tubuh) atau grafik, serta visual (fotografi).

Mulyana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa komunikasi memiliki 4 fungsi, yang pertama adalah Komunikasi sebagai Komunikasi Sosial yang mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi kedua adalah Komunikasi Ekspresif yang tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Fungsi ketiga adalah Komunikasi Ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif dan simbolik oleh sekelompok orang, dan fungsi keempat adalah Komunikasi Instrumental

yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.

Komunikasi sebagai interaksi antar manusia tentu saja akan menemui hambatan-hambatan yang akan berpengaruh terhadap efektifitas komunikasi. Menurut Effendy (2008) dijelaskan bahwa faktor-faktor penghambat komunikasi adalah sebagai berikut :

a. Hambatan Sosio-antro-psikologis

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional, artinya komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung. Hambatan sosiologis merupakan hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan golongan dan lapisan dalam masyarakat yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan dan sebagainya. Hambatan antropologis karena adanya perbedaan postur, warna kulit, kebudayaan, gaya hidup, norma, kebiasaan dan bahasa. Hambatan psikologis bisa disebabkan karena komunikator tidak mengkaji diri komunikan sebelum melancarkan komunikasi. Komunikasi sulit berhasil apabila komunikan sedang sedih, kecewa dan mengalami kondisi psikologis lainnya, juga saat komunikan menaruh prasangka kepada komunikator.

b. Hambatan Semantis

Faktor semantis menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikirannya kepada komunikan. Faktor semantis harus diperhatikan karena jika komunikator salah ucap maka akan menimbulkan *misunderstanding*.

c. Hambatan Mekanis

Hambatan mekanis terjadi saat adanya gangguan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, contohnya suara kresek radio, gambar buram di televisi, bunyi kendaraan lewat, halaman surat kabar yang sobek dan sebagainya.

d. Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis terjadi karena adanya gangguan dari lingkungan saat berlangsungnya proses komunikasi, seperti suara riuh orang-orang, kebisingan lalu lintas, suara hujan atau petir, pesawat terbang lewat dan lain-lain.

2. Konsep Tentang Komunikasi Lingkungan

Komunikasi lingkungan adalah penggunaan pendekatan, prinsip, strategi dan teknik-teknik komunikasi untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Komunikasi lingkungan adalah pertukaran informasi yang disengaja baik dalam pengetahuan maupun dalam bentuk kebijakan tentang lingkungan menurut Flor & Cangara (2018).

Menurut Flor & Cangara (2018) komunikasi lingkungan terinspirasi oleh teori sistem umum atau biasa disebut *General System Theory*. Teori ini menyebutkan bahwa dalam sistem kehidupan makhluk hidup, ada tiga fungsi penting, yakni:

- a. Pertukaran materi dengan lingkungannya dan dengan sistem kehidupan yang lain;
- b. Pertukaran energi dengan lingkungannya dan sistem kehidupan yang lain; dan
- c. Pertukaran formasi dengan lingkungannya dan sistem kehidupan lainnya.

Komunikasi tidak lebih dari pertukaran informasi dalam arti luas, komunikasi lingkungan diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap kehidupan, baik itu organisme, ekosistem, maupun untuk sistem sosial. Komunikasi lingkungan juga menganut prinsip bahwa tujuan dari komunikasi manusia adalah saling pengertian (*mutual understanding*).

Di dalam agenda program lingkungan, komunikasi tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen atau alat untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan, melainkan ia menjadi bagian integral dari pengelolaan lingkungan itu sendiri. Artinya, tanpa komponen komunikasi maka pengelolaan lingkungan akan menghadapi banyak masalah yang cukup krusial.

Selanjutnya, komunikasi lingkungan juga tidak harus senantiasa berorientasi pada media atau media-sentris, tetapi komunikasi harus mampu membangkitkan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Bahkan, komunikasi harus mampu memberdayakan anggota masyarakat untuk

tidak tinggal diam sebagai penerima pasif, tetapi juga bisa menjadi sumber informasi yang aktif.

Flor & Cangara (2018) menjelaskan tentang empat inti pesan komunikasi lingkungan. Keempat inti pesan itu sesuai dengan empat hukum ekologi yang disebutkan oleh Barry Commoner, ahli biologi Amerika dalam bukunya *The Closing Circle*. Inti pesan itu adalah sebagai berikut :

- a. Segala sesuatunya berhubungan satu sama lainnya.

Pernyataan ini berhubungan dengan konsep teori sistem keterkaitan. Setiap hal yang ada dalam ekosistem akan saling terkait dan saling berhubungan seperti jaringan raksasa. Meluas ke seluruh ruang ekosistem yang kita memiliki yakni jaringan kehidupan. Bila dalam jaringan ini terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian pada salah satu bagian jaringan, maka akan menimbulkan konsekuensi pada bagian lain dalam jaringan itu.

- b. Segala sesuatunya akan pergi ke suatu tempat.

Pernyataan kedua dari Commoner menyebutkan keterkaitan antara limbah dan manajemen. Limbah menjadi bagian dari lingkungan kita. Di sini limbah bukan dalam arti kata yang sempit bahwa ia dibuang di sekitar tempat kita, tetapi akan selalu berakhir di suatu tempat.

- c. Alam memiliki jalan terbaik.

Teknologi tidak bisa menyelesaikan semua masalah masyarakat. Bahkan, mungkin menjadi penyebab beberapa masalah ini. Alam memiliki cara sendiri untuk mengompensasi ketidakadilan, menjaga keseimbangan, dan memecahkan masalah.

d. Segala sesuatunya tidak serta merta gratis.

Setiap yang diperoleh itu memiliki biaya. Pemanfaatan sumber daya alam setelah diproses akan memiliki nilai (harga). Di saat tertentu, harga itu lebih tinggi nilainya dari manfaat yang kita dapatkan.

Selanjutnya Flor & Cangara (2018) menyebutkan ada beberapa hal yang diperlukan dalam aplikasi komunikasi lingkungan, yakni:

a. Pengetahuan tentang hukum ekologi.

Praktisi komunikasi lingkungan harus akrab dengan empat hukum ekologi di atas sebagaimana disebutkan oleh Barry Commoner. Hukum informal ini oleh Commoner disebutkan jika hal itu disampaikan dengan cara-cara nonteknis akan mudah dipahami oleh orang awam,

b. Sensitivitas terhadap dimensi budaya.

Meskipun beberapa orang percaya bahwa alam dan budaya adalah dua dikotomi yang hidup dalam kedamaian. Para pakar lingkungan menganggap alam dan budaya sebagai sebuah kontinum. Alam dan budaya benar-benar saling membahu dalam berevolusi. Untuk itu salah satu strategi terbaik untuk komunikasi lingkungan adalah pemanfaatan budaya asli atau media-media populer yang dikenal oleh masyarakat. Praktisi komunikasi lingkungan harus peka terhadap dimensi budaya, bukan hanya aspek teknis pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

c. Kemampuan untuk membuat jaringan secara efektif.

Komunikasi lingkungan sesekali mengambil peran advokasi. Jaringan sangat penting dalam advokasi.

- d. Efisiensi dalam menggunakan media untuk pengaturan agenda sosial sosial.

Media menetapkan agenda sosial. Seorang praktisi komunikasi lingkungan tidak hanya menyadari hal ini. Melainkan dia harus mahir menetapkan agenda lingkungan dengan menggunakan media.

- e. Apresiasi dan praktik etika lingkungan untuk menyelamatkan bumi

Kompleksitas yang mencirikan komunikasi lingkungan membuat penting bagi kita untuk mempraktikkan apa yang kita sampaikan. Siapa yang akan percaya kita, jika kita tidak mempraktikkan apa yang kita bicarakan atau sampaikan kepada orang lain, dan tidak memberi apresiasi kepada individu yang melaksanakan etika lingkungan dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Komunikasi lingkungan adalah salah satu bagian dari komunikasi pembangunan sebagaimana penjelasan Flor & Cangara (2018), bahwa komunikasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu lahir dan berkembang sebagai jawaban terhadap beberapa masalah yang paling mendesak dari keterbelakangan masyarakat, termasuk lingkungan dan degradasi sumber daya. Komunikasi lingkungan sebagai suatu kajian baru yang banyak membicarakan masalah-masalah lingkungan, utamanya hubungan antara manusia dan alam sekitarnya secara logis dimasukkan sebagai bagian dari disiplin komunikasi pembangunan.

Menurut Everett M. Rogers dalam Cangara (2020), mengemukakan definisi komunikasi pembangunan bahwa,

Development communication refers to the uses to which communication is put in order to further development. Such

applications are intended to either further develop in a general way, such as by increasing the level of the mass media exposure among the nations citizen, in order to create a favorable climate for development, or to support a specific definite program or project.

Komunikasi pembangunan menunjukkan di mana komunikasi digunakan untuk pembangunan/kemajuan lebih lanjut. Penerapannya ditujukan untuk pembangunan dalam arti luas, misalnya peningkatan daya jangkau (*exposure*) media massa di kalangan para warga negara, menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan, atau untuk mendukung suatu program atau proyek tertentu.

Nora C. Quebral sebagai seorang perintis lahirnya konsep dan kajian komunikasi pembangunan mendefinisikan komunikasi pembangunan ialah:

Development communication as the art and science of human communication applied to the speedy transformation of a country and the mass of its people from poverty to a dynamic state of economic growth that makes possible greater social equality and the larger fulfillment of the human potential.

Komunikasi pembangunan sebagai seni dan ilmu komunikasi antarmanusia yang diterapkan untuk melakukan transformasi secara cepat pada suatu negara atau masyarakat dari kondisi kemiskinan menuju ke suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis sehingga, memungkinkan terjadinya persamaan sosial yang lebih besar dan pemenuhan/pengembangan secara luas pada potensi diri manusia. Cangara (2020).

Definisi ini kemudian dimodifikasi pada tahun 2011 menjadi:

Development communication as the science of human communication linked to the transitioning of communities from

poverty in all its form to a dynamic, overall growth that fosters equity and unfolding of individual potential.

Komunikasi pembangunan sebagai ilmu komunikasi antarmanusia yang berkaitan langsung dengan pengalihan/transformasi masyarakat dari suatu kondisi kemiskinan dalam segala bentuknya ke arah suatu pertumbuhan yang lebih dinamis dan menyeluruh sehingga memungkinkan terciptanya suatu pertumbuhan/kemajuan dalam hal pemerataan dan pengembangan potensi diri individu, Cangara (2020)

Menurut Cangara (2020), ilmu komunikasi manusia terkait dengan transisi masyarakat dari kemiskinan dalam segala bentuknya ke pertumbuhan yang dinamis dan menyeluruh dengan menumbuhkan kesetaraan dan potensi individu. Komunikasi pembangunan menyirkulasikan informasi dan pengetahuan yang berguna; menyediakan forum di mana masalah dapat diungkapkan dan diselesaikan; mengajarkan ide-ide, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan; serta menciptakan basis konsensus untuk kestabilan negara. Quebral selanjutnya melakukan modifikasi pada tahun 2017 dengan menyebutkan:

Development communication as the science of human communication linked to the transitioning of communities from poverty in all its form to a dynamic, overall growth that fosters equity and the unfolding of individual potential. Development communication circulates useful information and knowledge; provides a forum where problems and issues may be aired; teaches needed ideas, skills, and values; and creates a base of consensus that stabilizes the state.

Komunikasi pembangunan ialah studi komunikasi antarmanusia yang berhubungan dengan transisi masyarakat dari kemiskinan dalam segala bentuknya ke arah pertumbuhan yang dinamis dan menyeluruh guna mendorong terciptanya pemerataan dan pengembangan potensi individu. Komunikasi pembangunan menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang berguna, menyediakan forum untuk mengungkapkan dan menyelesaikan masalah, mengajarkan gagasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan; serta menciptakan kestabilan negara atas dasar konsensus.

Oleh karena itu, menurut Cangara (2020) komunikasi pembangunan adalah kegiatan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dan berdaya guna, menyediakan forum sebagai tempat membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, mengajarkan keterampilan dan memberi pengetahuan. Ia mencakup mendidik massa tentang lingkungan sosial-ekonomi mereka, membangun kemandirian berdasarkan dukungan dan berbagi solidaritas, keterlibatan orang dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, memotivasi orang untuk memperoleh kemampuan mengelola konflik dan membangun konsensus, membantu orang-orang menjadi pribadi yang mandiri dan akhirnya menyadari diri sebagai bagian dari suatu komunitas sosial atau suatu bangsa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi lingkungan merupakan bagian dari komunikasi pembangunan karena sesuai dengan tujuannya bahwa komunikasi pembangunan akan

menciptakan perbaikan sosial dan ekonomi dengan keterampilan dan pengetahuan dari komunikator pembangunan jika dikaitkan dengan komunikasi lingkungan maka bentuk komunikasi pembangunan di lingkungan adalah bagaimana menggunakan pendekatan dan teknik komunikasi untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

3. Konsep Perencanaan dan Strategi Komunikasi Penyadaran Masyarakat

Strategi komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan komunikasi. Hal ini disebabkan karena membahas strategi komunikasi tidak bisa dilakukan secara parsial tanpa mengkaji perencanaan komunikasi (Cangara, 2017). Perencanaan komunikasi sangat penting karena sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan. Karena itu perencanaan komunikasi diharapkan akan mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektifitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan perencanaan komunikasi diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai, apakah itu pencitraan, pemasaran, penyebarluasan ide, kerjasama, atau pembangunan infrastruktur komunikasi. Menurut Cangara (2017), perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana sudah tentu selalu dikaitkan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif.

Secara umum terdapat beberapa pokok pikiran yang menjelaskan tentang perencanaan komunikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan komunikasi sebagai usaha yang disengaja
- b. Perencanaan komunikasi dibuat dalam bentuk dokumen tertulis
- c. Perencanaan komunikasi merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan seni komunikasi
- d. Ia merupakan aktifitas manusia yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya
- e. Ia memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu
- f. Untuk mencapai tujuan itu perencanaan komunikasi menetapkan alokasi sumber daya (dana, barang/alat, manusia atau keahlian, dan program)
- g. Perencanaan komunikasi menggunakan unsur-unsur komunikasi yang mencakup sumber, pesan, media, target sasaran, dan efek (perubahan) sebagai komponen audit
- h. Perencanaan komunikasi memerlukan pengukuran hasil atau evaluasi

Jadi menurut Cangara (2017), sebuah perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang harus menjawab :

- a. Apa yang ingin dicapai?
- b. Kenapa kita menginginkan ada hasil yang diperoleh?
- c. Siapa yang menjadi target sasaran?
- d. Apa yang menjadi kata kunci pada pesan yang akan dibawakan?
- e. Siapa yang akan menjadi akto dalam penyampaian pesan dan bagaimana cara untuk memilih dan menentukannya?
- f. Dengan cara apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan?
- g. Bagaimana tipe saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan?
- h. Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan setiap pesan?
- i. Bagaimana mengukur atau mengevaluasi hasil dari program yang dijalankan?

Dalam Cangara (2017) dijelaskan bahwa UNESCO membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi, apakah itu dioperasikan oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi antara pemerintah dan swasta.
- b. Melakukan analisis tentang struktur dan sumber daya komunikasi yang ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta media-media apa saja yang ada dalam masyarakat.
- c. Melakukan analisis kritis terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap komunikasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, apakah hiburan, pendapat (opini), atau berita.
- d. Melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai dari sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan umpan balik dari masyarakat.
- e. Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah media mengalami kemajuan dalam hal jumlah tiras (oplah), sebaran, atau peringkat dalam tayangan.
- f. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebijaksanaan komunikasi yang ada.

Sementara dalam buku “*Environmental Communication*” yang ditulis oleh Jurin R, dkk (2010) dijelaskan tentang bagaimana merencanakan komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. *Problem Statement*, pernyataan masalah akan menuntun kita kepada proses perencanaan komunikasi.
- b. *Goals*, menentukan tujuan komunikasi.
- c. *Audience Analysis*, menganalisis kebutuhan khalayak dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang khalayak yang menjadi sasaran komunikasi.
- d. *Objectives*, menentukan target komunikasi.
- e. *Message Development/Media Options/Audience Suitability*, menyusun pesan, memilih kanal komunikasi yang tepat agar bisa diterima khalayak.
- f. *Media Choice and Design*, merancang dan memilih media yang tepat.
- g. *Timeline*, membuat schedule tahapan-tahapan perencanaan komunikasi.
- h. *Front-End Evaluation*, penilaian awal rencana komunikasi.
- i. *Formative Evaluation*, evaluasi selama proses perencanaan berlangsung.
- j. *Summative Evaluation*, evaluasi akhir untuk mengukur keberhasilan perencanaan komunikasi.
- k. *Project Budget*, rencana anggaran.

Keberhasilan strategi komunikasi tentunya memerlukan perencanaan komunikasi yang baik dan tidak bisa begitu saja diperoleh tanpa menganalisis keunggulan dan kesiapan semua komponen yang terlibat di dalamnya. Agar dalam menerapkan suatu strategi komunikasi bisa berhasil maka segala sesuatunya harus dikaitkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Lasswell (Suryadi, 2018) yakni *Who?* (Siapakah komunikatornya), *Says what?* (pesan apa yang disampaikan), *In which channel?* (media apa yang digunakan), *To whom?* (Siapa komunikannya), dan *With what effect?* (bagaimana pengaruhnya). Oleh karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memilih dan menetapkan komunikator
- b. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak
- c. Teknik menyusun pesan
- d. Memilih media dan saluran komunikasi
- e. Produksi media
- f. Uji awal materi komunikasi
- g. Penyebarluasan media komunikasi
- h. Menganalisis efek komunikasi
- i. Memobilisasi kelompok berpengaruh
- j. Penetapan rencana anggaran
- k. Penyusunan jadwal kegiatan
- l. Penetapan tim kerja
- m. Evaluasi dan audit komunikasi

Dalam perkembangannya komponen strategi komunikasi selain yang diadopsi dari Harold Lasswell juga ditambahkan dengan hasil kajian dari setting komunikasi (Suryadi, 2018), sebagai berikut :

- a. Lingkungan komunikasi
- b. Aturan dan tata organisasi

- c. Visi-misi, tujuan, dan sasaran organisasi
- d. Tujuan, sasaran, dan target komunikasi
- e. Program kerja dan kegiatan organisasi
- f. Bentuk dan model kepemimpinan yang diterapkan
- g. Prosedur dan kebijakan yang dimiliki
- h. Infrastruktur komunikasi
- i. Pembiayaan komunikasi
- j. Pemberdayaan SDM komunikasi
- k. Dampak praktik komunikasi organisasi yang diterapkan
- l. Pengembangan hasil praktik strategi komunikasi
- m. Penyebarluasan hasil praktik strategi komunikasi

Dalam penerapan komunikasi khususnya kepada usaha untuk mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat, komunikator biasanya menghadapi gangguan dan rintangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Shannon dan Weaver (1949) dalam Cangara (2017: 40) bahwa gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi terhadap salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berjalan secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan yakni adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Gangguan atau rintangan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas delapan macam, yakni:

- a. Gangguan teknis. Gangguan yang terjadi saat salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan.
- b. Gangguan semantik. Gangguan komunikasi karena adanya kesalahan pada bahasa yang digunakan (Blake, 1979).
- c. Gangguan psikologi. Gangguan yang terjadi karena adanya persoalan yang dalam diri individu.
- d. Rintangan fisik. Rintangan karena kondisi geografis dan gangguan organik pada fisik manusia.
- e. Rintangan status. Rintangan karena adanya jarak sosial di antara pelaku komunikasi.
- f. Rintangan kerangka berfikir. Rintangan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak.

- g. Rintangan budaya. Rintangan karena adanya perbedaan norma, nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi.
- h. Rintangan birokrasi. Terhambatnya proses komunikasi yang disebabkan oleh struktur organisasi.

Untuk meminimalisir gangguan dan rintangan komunikasi terhadap masyarakat khususnya dalam rangka perbaikan dan pelestarian lingkungan, maka sangat penting untuk menyiapkan strategi komunikasi. R. Wayne Pace, dkk dalam Ruslan (2007) mengatakan bahwa tujuan strategi komunikasi terdiri dari empat hal yaitu:

- a. Memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi
- b. Pembinaan cara penerimaan yang terus dilakukan secara baik
- c. Penguatan motivasi
- d. Mendukung pencapaian tujuan komunikasi pihak komunikator melalui proses komunikasi

Sukarni (2012:1) dalam Suryadi (2018) menjelaskan bahwa dalam strategi komunikasi terdapat elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Mendefinisikan dan memformulasikan sasaran komunikasi dengan menerapkan sistem Formula SMART, yaitu *Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, dan Temporal* (dalam kurun waktu tertentu digunakan dalam program kesadaran tentang implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan).
- b. Memilih kelompok target. Dalam pemilihan kelompok target, terdapat dua kelompok target yaitu *primary target groups*, dan *secondary target groups*.
- c. Membuat pesan kunci/*key messages* bagi kelompok target dengan alasan dilaksanakannya program, tujuan perubahan tingkat pengetahuan kelompok target dan bagaimana cara melakukan pesan yang disampaikan.

Elemen strategi komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Beer (2013) dalam Suryadi (2018) bahwa:

Strategy where are you going, and why? a) Audiences who are the key audiences?; b) Announcement given the strategy, are you

making announcement? What are you announcing?; c) Messages what are you saying about the announcement? d) tactics how will you implement your strategy, both before, during, and after the main announcement (assuming you have one)? e) Issues what problems may you have to overcome?

Dari pendapat di atas jelas bahwa strategi komunikasi dapat dilaksanakan jika dalam perencanaannya pihak komunikator sudah mendefinisikan siapa yang akan menjadi audiensnya, kemudian bagaimana bicara kepada audiens tersebut sehingga pesan bisa diterima dengan baik, oleh karena itu seorang komunikator harus mampu menempatkan dirinya sebagai komunikator yang bijaksana.

Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori, dan Praktek (2006 : 35) memberi penjelasan tentang seberapa pentingnya strategi komunikasi dipersiapkan. Untuk itu penting untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menentukan strategi komunikasi, yaitu:

a. Pengenalan Khalayak :

- 1) Faktor kerangka referensi. Kerangka referensi sangat menentukan kesuksesan dalam proses komunikasi karena setiap orang memiliki latar belakang berbeda
- 2) Faktor Situasi dan Kondisi. Situasi disini adalah situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan yang kita sampaikan. Sedangkan kondisi yang dimaksud adalah keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat menerima pesan dan komunikator.

b. Penyusunan Pesan

Wilbur Schramm dalam Arifin (1994:68-69) mengajukan syarat syarat pesan sehingga berhasil mencapai efektivitasnya yaitu :

- 1) Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik pesan sasaran yang dituju.

- 2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama antar sumber dan sasaran sehingga terjadi pertemuan dan saling pengertian.
- 3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi daripada sasaran dan menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan itu.
- 4) Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana kesadaran pada saat digerakkan untuk memberikan jawaban yang dikehendaki.

c. Menetapkan Metode

Menurut Arifin (1994:72) bahwa pertama, strategi komunikasi dapat dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian terhadap isi pesan. Sedangkan yang kedua yaitu melihat komunikasi dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh karena itu, yang pertama (menurut cara pelaksanaannya) dapat diwujudkan dalam dua bentuk :

- 1) Metode pengulangan. Pada metode ini, penyampaian pesan dilakukan secara berulang-ulang kepada khalayak. Melalui metode ini komunikator dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian sebelumnya.
- 2) Metode penyaluran pesan. Komunikator terlebih dahulu mengenal khalayaknya dan mulai melontarkan idenya sesuai dengan kepribadian, sikap-sikap, dan motif khalayak.

Sedangkan yang kedua, menurut bentuk isi pesan diwujudkan dalam empat metode antara lain :

- 1) Metode informatif. Suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara memberikan penerangan.
- 2) Metode persuasif. Persuasif berarti mempengaruhi dengan jalan membujuk.
- 3) Metode edukatif. Sebagai salah satu usaha dalam mempengaruhi khalayak dengan melontarkan pesan yang

berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman.

- 4) Metode kursif. Berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan menerima gagasan-gagasan atau ide-ide yang dilontarkan. Metode ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi.

d. Seleksi dan Penggunaan Media Komunikasi.

Media komunikasi pada umumnya dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak berupa surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan bahasa tulisan lainnya. Sedangkan media elektronik dapat dibedakan menjadi audio (radio) dan audiovisual (televisi dan internet).

Efektifitas komunikasi juga bisa dipengaruhi oleh kampanye komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kampanye merupakan kegiatan komunikasi untuk menyampaikan informasi secara terencana, bertahap dan terkadang memuncak dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dari opini seseorang atau massa. Herbert Siemens dalam Basri (2020) menyebutkan *campaign is organized of people throught a series of messages* (kampanye adalah kegiatan terorganisir oleh orang-orang melalui serangkaian pesan). Sementara William Paisley dalam Basri (2020) menyatakan bahwa "*campaign or communication campaign are only means of influencing public knowledge, attitude, and behavior*". Selain itu Rogers dan Storey juga mendefinisikan kampanye sebagai "serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu" Dari ketiga definisi tersebut dapat

dikatakan bahwa kampanye adalah kegiatan terorganisir dan terencana yang melibatkan kelompok tertentu untuk menyampaikan serangkaian pesan secara berkelanjutan dalam rangka mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan sifat masyarakat.

Merujuk pada penjelasan tentang kampanye di atas maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

4. Konsep Kesadaran Manusia terhadap Lingkungan

Kesadaran manusia berkaitan dengan pikiran, sikap dan perilaku manusia dalam menyikapi realitas kehidupannya yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan (Yuniarto, 2013:36). Menurut Suryabrata (1983:189) dalam Yuniarto (2013) kesadaran adalah bagian dari aspek kejiwaan mempunyai dua komponen pokok yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing memiliki peran penting dalam orientasi manusia dalam dunianya.

Menurut Yuniarto (2013), fungsi jiwa melahirkan adanya sikap jiwa dan merefleksikan perbuatan manusia. Dengan demikian kesadaran ini menimbulkan perbuatan manusia. Jadi indikator suatu kesadaran manusia adalah adanya perbuatan tentang yang dicitrainya. Oleh sebab itu,

kesadaran merupakan respon seseorang terhadap perangsang (stimulus) di luar dirinya. Manusia selalu hidup berinteraksi dengan lingkungannya secara terus menerus. Interaksi inilah yang memberikan berbagai pengalaman, dan pengalaman ini akan menimbulkan "citra lingkungan" yang akan menggambarkan tentang lingkungan hidup. Jika citra lingkungan seseorang bersifat negatif dalam arti tidak memahami betapa pentingnya kelestarian fungsi lingkungan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka seseorang itu cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungannya. Citra lingkungan negatif tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang menurut Otto Soemarwoto (1994) dalam Yuniarto (2013) pada gilirannya akan berdampak pada sejumlah tata kehidupan termasuk manusia sendiri.

Manusia yang berperan sebagai kholifah di muka bumi ini memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan hidup ini. Namun dalam realitasnya rusaknya lingkungan langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh perilaku manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Kesadaran ini muncul dari kemampuan manusia untuk mengerti akan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupannya. Menurut Freire (1999: 105) dalam Yuniarto (2013), pengertian tersebut didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang diperoleh melalui pengalaman (*experience*) serta informasi tentang lingkungan hidup.

Hasil penelitian teoretik tentang kesadaran lingkungan hidup dari Neolaka (1991), menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap lingkungan hidup, dan dapat terlihat pada perilaku dan tindakan masing-masing individu.

Kesadaran lingkungan ini berkait erat dengan kemampuan manusia untuk memperdulikan masalah lingkungan. Kepedulian tersebut merupakan kemampuan jiwa untuk memperhatikan hakikat lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran manusia terhadap lingkungan merupakan unsur kejiwaan yang cenderung muncul dari dalam diri manusia yang diaplikasikan dalam tindakannya terhadap realitas lingkungannya. Pengetahuan dan pengalaman seseorang tersebut akan memunculkan respon penting atau pentingnya lingkungan hidup bagi hidup dan kehidupannya.

Kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup dan kelestariannya merupakan hal yang amat penting dewasa ini di mana pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan hal yang sulit dihindari. Kesadaran masyarakat yang terwujud dalam berbagai aktifitas lingkungan maupun aktifitas kontrol lainnya adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan penyelamatan lingkungannya.

Menurut Subagyo (199: 17) dalam Yuniarto (2013), kesadaran terhadap terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah atau bersih saja, akan tetapi ini sudah masuk pada kewajiban

manusia untuk menghormati hak-hak orang lain. Hak orang lain tersebut adalah untuk menikmati dan merasakan keseimbangan alam secara murni. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya merusak saja, sebaiknya dihindari dalam perspektif ini. Oleh karena itu, tindakan suatu kelompok yang hanya ingin menggapai keuntungan pribadi saja sebaiknya juga harus meletakkan rasa toleransi ini.

Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungannya adalah suatu bentuk dari toleransi ini. Toleransi atau sikap tenggang rasa adalah bagian dari konsekuensi logis dari kita hidup bersama sebagai makhluk sosial. Melanggar konsekuensi ini juga berarti melanggar etika berkehidupan bersama. Seperti dikatakan Plato bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu menghargai satu dan lainnya.

Kondisi senyatanya dari masyarakat kita mengenai kesadaran lingkungan hidup ini nampaknya masih tercermin seperti apa yang dikatakan Subagyo (1999: 17) dalam Yuniarto (2013) seperti berikut ini, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu:

- a. Rasa tepo seliro yang cukup tinggi, dan tidak terlalu ingin mengganggu.
- b. Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, sepanjang kehidupan saat ini masih berjalan dengan normal.
- c. Kesadaran melapor (jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan dianggap sebagai melawan hukum lingkungan) nampaknya masih kurang. Hal ini dirasakan akan mengakibatkan masalah lingkungan semakin panjang
- d. Tanggungjawab mengenai kelestarian alam masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali.

Berkaitan dengan konsep kesadaran ini, maka Robbins (2003) dalam Yuniarto (2013) pertama-tama menekankan bahwa betapa selama

sekitar seratus tahun ini negara-negara industri menyaksikan pertumbuhan kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya yang disertai dengan konsumsi sumber daya alam serta barang-barang lainnya. Tercapainya kemakmuran yang luar biasa itu menimbulkan pengaruh dahsyat terhadap ekosistem. Selanjutnya, Robbins (2003) dalam Yuniarto (2013) mensitir bahwa fenomena perubahan yang menjurus ke arah maraknya ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan atau kebodohan tentang adanya kerusakan lingkungan.

Analisis kritis tentang hal di atas, menurut Robbins (2003) dalam Yuniarto (2013) yakni :

The lack of consideration and apathy about environmental problems arises from a disconnect that has developed between humans and the land on which they live

Bahwa yang mendasari sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap lingkungan itu muncul dan terpisahnya hubungan hubungan antara manusia dan tanah di mana mereka tinggal. Pendapat Roderick Nash, seperti yang disitir oleh Robbins (2003) dalam Yuniarto (2013) menegaskan bahwa pangkal persoalannya, ... *which gave man dominion over his environment encouraged arrogance rather than respect*, yakni karena manusia ditempatkan di atas lingkungannya mendorong terjadinya keangkuhan ketimbang rasa hormat.

Untuk mengatasi masalah lingkungan dewasa ini, Robbins (2003) dalam Yuniarto (2013) mengajukan gagasan, yakni :

The first step in addressing our current environmental problems is to develop an environmentally-conscious society. Education is an important key towards achieving the goal of environmental awareness.

Bahwa perlunya dikembangkan sebuah masyarakat yang sadar akan lingkungan, dan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut yakni sadar lingkungan.

Menurut Noelaka (2008), ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan, yaitu:

1. Faktor Ketidaktahuan. Ketidaktahuan kepada lingkungan menyebabkan ketidaksadaran pada lingkungan hidup.
2. Faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut Arianto, dkk (1988) kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial.
3. Faktor Kemanusiaan. Jujun S. Suriasumantri (1987), dalam bukunya: *Filsafat Ilmu, sebuah Pengantar Populer*, menyatakan bahwa manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan guna pemenuhan kebutuhan tersebut.
4. Faktor Gaya Hidup. Beberapa gaya hidup di masyarakat yang dapat memperparah rusaknya lingkungan hidup adalah hedonisme, materialisme, konsumerisme, sekularisme, dan individualisme.

5. Konsep Perbaikan Lingkungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dalam Yuniarto (2013) dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup menurut undang-undang ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Unsur Hayati (Biotik)
Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.
- b. Unsur Sosial Budaya
Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan manusia dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.
- c. Unsur Fisik (Abiotik)
Unsur fisik (abiotik) yaitu unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi.

Permasalahan lingkungan merupakan suatu fenomena klasik yang seringkali ditemui pada sebuah masyarakat modern yang telah mengenal teknologi guna mencapai efisiensi serta efektifitas untuk mencapai keuntungan. Berbagai masalah lingkungan muncul akibat kegiatan manusia yang mengeksplotasi lingkungan demi keuntungan sebanyak-banyaknya. Lingkungan merupakan tempat untuk hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain, sehingga menjaga lingkungan menjadi unsur yang sangat penting dalam keseimbangan kehidupan. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya kebutuhan, akhirnya manusia melakukan eksploitasi kepada alam dan lingkungan secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut.

Munculnya berbagai permasalahan lingkungan ini dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perilaku manusia. Alam ini

rusak karena manusia selalu mengambil untungnya tetapi kurang memenuhi kewajiban dalam melestarikannya. Hal ini terjadi karena manusia memiliki sifat tamak dan serakah. Selain itu, bahwa kerusakan alam disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian kebijakan pemerintah terhadap penggunaan kawasan tertentu. Kebijakan penataan ruang lebih banyak berpihak kepada pengusaha dan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat.

Menurut Yuniarto (2013), ada lima faktor yang menjadi penyebab kerusakan alam, yaitu:

- a. Alam tidak dipelihara.
- b. Alam tidak diorientasikan pada kemakmuran rakyat. Analisisnya, perundang-undangan kita yang masih banyak celah dan multitafsir yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
- c. Aspek masyarakat tidak peduli hukum. Mereka dibayar untuk merusak alam.
- d. Budaya hukum (cara pandang menilai alam dan hukum), cara pandang pragmatis/egoistis menjadi nilai budaya hukum yang lemah.
- e. Penggunaan teknologi yang tidak menunjang. Teknologi itu bermata dua, satu sisi bisa menjadi penyebab kerusakan, di sisi lain bisa menjadi salah satu solusi terhadap kerusakan lingkungan itu.

Sebenarnya manusia bisa mengelola alam dengan baik, yakni sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya secara secukupnya saja. Namun demikian ada sifat dari manusia yakni keserakahan terhadap segala sesuatu. Hal inilah yang kemudian membuat banyak terjadi eksploitasi alam sekitar, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Oleh karena itu sebelum terjadi hal-hal yang mengancam kelangsungan

hidup manusia tentu saja harus dilakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan yakni dengan cara melestarikan lingkungan.

Pemecahan terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup khususnya pelestarian sumber daya alam harus dilakukan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, karena persoalan lingkungan adalah persoalan universal. Upaya pelestarian lingkungan merujuk pada pembangunan manusia maka yang harus dilakukan secara bertahap adalah peningkatan kesadaran, etika, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia berwawasan lingkungan.

Pelestarian lingkungan dimaknai sebagai upaya mencintai, memelihara, menjaga dan memanfaatkan keberlangsungannya untuk generasi mendatang. Ada prinsip-prinsip menurut Leonardo Boff (Buru, 2009) dalam Yuniarto (2013) yaitu:

- a. Prinsip keberlanjutan (*Sustainability*). Dalam hubungan dengan etika ekologi, prinsip ini menjadi pedoman untuk memakai atau merambah alam secara rasional sesuai kebutuhan kita tanpa merusaknya. Semua organisme hidup (binatang dan tanaman) harus diberikan kesempatan untuk beregenerasi, sehingga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem akan terjamin. Prinsip ini selalu berkaitan erat dengan prinsip toleransi (*tolerance*) yang memotivasi kita untuk secara bersama berjuang demi keberlanjutan kehidupan semua organisme, termasuk kelangsungan hidup generasi mendatang.
- b. Prinsip penghargaan dan perhatian terhadap lingkungan/alam (*Respect and Mindfulness*). Prinsip ini membantu manusia untuk memperlakukan organisme lain secara hati-hati dan penuh cinta serta dapat membantu melihat dan memahami nilai yang ada dalam semua ciptaan dan membawa kita pada sikap penuh penghargaan dalam berelasi dengan ciptaan lain.
- c. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip ini memotivasi kita untuk memperlakukan ciptaan lain secara baik dan wajar. Tanggung jawab merupakan indikasi dari karakter etis manusia.

Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alami secara arif dan bijaksana.
- b. Mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- d. Mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

Menurut Pramudyanto (2014), dijelaskan bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Selain itu pada Pasal 67 Undang-undang tersebut menyatakan:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Hal ini berarti bahwa masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan.

Terdapat kebijakan nasional lingkungan hidup yang mengacu pada nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-

generasi mendatang. Pembangunan Berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamisme sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

- b. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (*constraint*) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan konsekuen.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya.
- d. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang benar, lengkap dan mutakhir.
- e. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan.
- f. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dihindari; bila sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung jawab pada pihak yang menyebabkan.
- g. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban

Dalam artikel online “Pengertian Pelestarian Lingkungan, jenis, dan contohnya”, 3 Januari 2021, dosengeografi.com/pelestarian-lingkungan.

Diakses pada 21 Agustus 2021, dijelaskan bahwa terdapat beragam contoh tindakan yang dapat dilakukan manusia, dalam pelestarian lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelestarian Tanah

Pengertian pelestarian lingkungan tanah adalah serangkaian usaha untuk menjaga kelestarian tanah atau lahan yang dilakukan/atau akan dikerjakan dalam upaya-upaya mengkonservasikan antara sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Upaya pelestarian lingkungan dalam menjaga lapisan tanah ini bisa dilakukan manusia, dengan tindakan sebagai berikut:

- 1) Menghijaukan kembali lahan gundul
- 2) Menanam dengan sistem terasering pada lahan miring
- 3) Menggunakan pupuk organik
- 4) Bercocok tanam dengan pola berlajur atau bergilir

b. Pelestarian Udara

Pengertian pelestarian udara adalah serangkaian mekanisasi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menjaga dan melindungi udara agar tidak tercemar dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kendaraan bermotor yang gas buangnya aman bagi lingkungan.
- 2) Menggunakan alat transportasi yang bebas gas buang seperti sepeda dan kendaraan listrik.
- 3) Mewajibkan pabrik melakukan penyaringan asapnya.
- 4) Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berbahan bakar fosil, yang menjadi bagian daripada Sumber Daya Alam tidak dapat diperbaharui.
- 5) Menanam pohon-pohon pada lahan terbuka.
- 6) Membuat taman rumah dan taman kota diberbagai daerah-daerah.
- 7) Reboisasi lahan hutan yang gundul.

c. Pelestarian Hutan

Pengertian pelestarian hutan adalah serangkaian upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga kestabilan alam. Sebagai salah satu

mencegah dampak pemanasan global yang pada saat ini diakui ataupun tidak menjadi masalah bersama. Adapun usaha menjaga kelestarian hutan, yang dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Reboisasi lahan hutan yang gundul.
- 2) Menebang hutan dengan cara tebang pilih.
- 3) Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hutan.
- 4) Mempertahankan hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam.
- 5) Melaporkan kejadian perusakan hutan kepada yang berwajib.

d. Pelestarian Flora dan Fauna

Pengertian pelestarian flora dan fauna adalah upaya untuk tidak menjadikan komoditas utama dari penghasilan yang terpaku pada hasil alam. Langkah ini guna mencegah bencana alam yang diakibatkan dari kurang fungsinya hewan dan tumbuhan di bumi. Adapun beragam bentuk, tentang usaha-usaha pelestarian flora dan fauna dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional.
- 2) Mengembangbiakkan flora dan fauna yang langka.
- 3) Melarang perburuan hewan langka.
- 4) Memberi perhatian pada dunia flora dan fauna.

e. Pelestarian Kawasan Pesisir dan Laut

Usaha pelestarian yang dapat dilakukan dalam kawasan pesisir dan laut dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Tidak membuang sampah ke laut.
- 2) Melarang pembuangan limbah industri ke laut secara langsung.
- 3) Tidak menggunakan bahan peledak dan pukat harimau untuk menangkap ikan laut.
- 4) Mempertahankan hutan mangrove.
- 5) Mencegah dan mengatasi tumpahan minyak.

f. Pelestarian Sumber Daya Air

Pengertian pelestarian Sumber Daya Air ialah serangkaian usaha pelestarian yang dapat dilakukan guna menghindari berkurangnya atau hilangnya fungsi air untuk kehidupan manusia. Langkah yang bisa dikerjakan dalam pelestarian ini misalnya dengan cara:

- 1) Menetapkan daerah resapan air dan menjaganya serta alih fungsi lahan.
- 2) Menghijaukan bagian hulu daerah aliran sungai.
- 3) Melakukan pengelolaan limbah cair industri.
- 4) Mempertahankan kawasan hutan lindung.
- 5) Membuat sumur resapan.
- 6) Menjaga kebersihan sungai.

Terkait dengan isu kerusakan lingkungan pesisir, dalam Pramudyanto (2014), diuraikan bahwa dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dapat dibagi menjadi strategi pengelolaan dan strategi pengendalian serta program pemantauan lingkungan pesisir:

1) Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan lebih mengarah pada sistem manajemen, yaitu pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Management*), yaitu sebagai berikut:

- a) Adopsi pendekatan yang sistematis dalam implementasi proyek atau program pengelolaan pesisir terpadu:
 - (1) Penerapan kerangka pengelolaan lingkungan pesisir dalam pengelolaan sektoral.
 - (2) Penggunaan kombinasi opsi-opsi pengelolaan.
 - (3) Adopsi pendekatan pencegahan.
- b) Pelibatan sektor masyarakat umum dalam proses pengelolaan lingkungan pesisir dan laut terpadu.

- c) Pengintegrasian informasi lingkungan, ekonomi dan sosial sejak tahap awal dari proses pengelolaan lingkungan pesisir dan laut terpadu.
- d) Pembentukan mekanisme bagi keterpaduan dan koordinasi.
- e) Pembentukan mekanisme pendanaan secara berkelanjutan.
- f) Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan pesisir dan laut terpadu di semua tingkatan.
- g) Pemantauan efektifitas proyek atau program pengelolaan pesisir dan laut terpadu.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Wilayah pesisir dan laut adalah suatu sistem sumber daya (*resources system*) yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
- b) Air merupakan faktor kekuatan penyatu utama (*the major integrating force*) dalam ekosistem wilayah pesisir.
- c) Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan serta dikelola secara terpadu
- d) Daerah perbatasan antara laut dan darat hendaknya dijadikan fokus utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
- e) Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isu dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif.
- f) Fokus utama dari pengelolaan lingkungan pesisir dan laut adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama (*common property resources*).
- g) Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam satu program pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu.
- h) Semua tingkat pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut.
- i) Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut.
- j) Evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir dan laut serta partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan pesisir dan laut.
- k) Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumber daya lingkungan pesisir dan laut.
- l) Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumber daya lingkungan pesisir dan laut.

- m) Pemanfaatan multiguna merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan lingkungan pesisir dan laut secara berkelanjutan.
- n) Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara tradisional harus ditangani.
- o) Analisis mengenai Dampak Lingkungan sangat penting bagi pengelolaan lingkungan pesisir secara efektif.

2) Strategi Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir. Dalam pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan:

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan, b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

Ada beberapa instrumen yang dapat dikembangkan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
- b) Tata ruang
- c) Baku mutu lingkungan hidup
- d) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e) Amdal (Analisis Dampak Lingkungan)
- f) UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
- g) Perizinan
- h) Instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- j) Anggaran berbasis lingkungan hidup
- k) Analisis risiko lingkungan hidup
- l) Audit lingkungan hidup dan
- m) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir harus dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing pihak yang terkait harus memperhatikan instrumen pencegahan yang tersebut di atas, melaksanakan penanggulangan seperti yang diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yaitu:

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sedangkan pemulihan lingkungan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b) Remediasi
- c) Rehabilitasi
- d) Restorasi dan/atau
- e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3) Program Pemantauan Pesisir

Pemantauan dapat dilaksanakan dengan fokus dan sasaran, antara lain terhadap :

- a) Kualitas buangan (*effluent/emission*) dan lingkungannya (air sungai, laut)

- b) Penaatan hukum dan peraturan
- c) Dampak dari buangan limbah
- d) Abrasi dan akresi di wilayah pantai
- e) Penurunan tanah dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir
- f) Daya dukung lingkungan
- g) Model prediksi perubahan lingkungan

Hasil pemantauan lingkungan pesisir digunakan untuk menyusun Status Mutu Kualitas Pesisir dan pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan program pada tahun berikutnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Komunikasi Lingkungan

Komunikasi lingkungan telah muncul di Amerika Serikat pada awal 1980 dari tradisi teori retorik. Pada dasarnya komunikasi lingkungan menggugah manusia agar lebih peduli terhadap lingkungan. Teori komunikasi lingkungan berasumsi bahwa representasi manusia dan alam, baik itu verbal maupun non verbal, publik atau interpersonal, tatap muka atau dimediasi semuanya diinformasikan untuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Komunikasi lingkungan adalah perencanaan dan penggunaan strategi dalam proses komunikasi maupun produk media untuk mendukung pembuatan kebijakan yang efektif, partisipasi masyarakat dan pelaksanaan proyek yang mengarah pada kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan akan terwujud jika dalam proses komunikasinya terjadi interaksi sosial dua arah yang memungkinkan

masyarakat memahami faktor utama lingkungan dan saling ketergantungan untuk menjawab suatu masalah dalam cara yang kompeten.

Robert Cox dalam *Environmental Communication and The Public Sphere* menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan sebagai alat pragmatis dan konstitutif untuk mengajajarkan, mengajak, mendorong, atau memberitahukan seseorang untuk peduli terhadap lingkungannya. Selain itu komunikasi lingkungan juga berfungsi untuk memberikan persepsi kita terhadap realitas kondisi lingkungan saat ini. Di dalamnya mencakup teori dan kajian yang memfokuskan pada hubungan komunikasi manusia dengan lingkungan.

2. Teori Keseimbangan (Balance Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider dan Theodore Newcomb pada tahun 1949. Asumsi dasar teori ini adalah orang akan berusaha mengurangi tekanan-tekanan dalam proses interaksi dengan melakukan langkah-langkah persuasi atau membujuk orang lain. Komunikasi pada dasarnya adalah proses menjaga dan memelihara keseimbangan hubungan, tanpa adanya keseimbangan ini, interaksi akan mengalami kemacetan dan kegagalan. Keseimbangan dapat juga dimaknai sebagai proses penyesuaian diri terhadap lawan bicara dengan memahami situasi, kondisi dan karakter komunikan.

3. Model Komunikasi Konvergen (*Convergency*)

Komunikasi konvergen didefinisikan sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai ke saling pengertian (konsensus). Komponen utama dari model ini adalah informasi (*uncertainly*), konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, jaringan hubungan sosial (*network relationship*). Menurut model ini komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Disini tidak lagi dikenal istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi). Dalam mekanisme pembangunan, model komunikasi ini kemudian dijadikan sebagai landasan pemberdayaan sosial (*Social empowerment*).

4. Model Perencanaan Komunikasi Lima Langkah

Model perencanaan komunikasi lima langkah terdiri dari lima tahap yakni: Penelitian (*Research*), Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Execute*), Pengukuran/evaluasi (*Measure*), Pelaporan (*Report*). *Research* dimaksudkan untuk mengetahui yang dihadapi. *Plan* adalah tindakan yang diambil setelah mengetahui masalah yang terjadi dengan membuat perencanaan komunikasi berupa strategi penentuan sumber atau komunikator, pesan, media, sasaran (segmen) dan efek yang diharapkan. *Execute* adalah tindakan yang diambil dalam rangka implementasi perencanaan komunikasi yang telah dibuat. *Measure* dilakukan untuk

mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan report merupakan tindakan terakhir dari kegiatan perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah komunikasi selanjutnya.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah peralatan analisis yang digunakan untuk mengukur *Strenght* (kekuatan yang dimiliki), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang yang mungkin bisa diperoleh) dan *Threats* (ancaman yang dapat ditemui) pada program komunikasi. Kekuatan dan kelemahan dapat didapatkan dari internal organisasi itu sendiri. Kedua komponen ini erat hubungannya dengan sumber daya dan manajemen organisasi. Sementara peluang dan ancaman dapat diperoleh dari eksternal organisasi. Kedua komponen tersebut banyak ditentukan oleh kemampuan komunikasi, jaringan, dan kerjasama dengan orang lain.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Yasir, dkk. 2020. Model Komunikasi Lingkungan dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kabupaten Bengkalis, (Online), Vol. 5, No. 2, (jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/692/226, diakses 22 Agustus 2021)

Secara garis besar, penelitian ini menggambarkan bahwa kerusakan hutan bakau dan abrasi merupakan masalah utama di pesisir Kabupaten Bengkalis. Pelestarian hutan bakau dengan menjadikan ekowisata yang berbasis komunitas menjadi solusi terbaik mengatasi masalah ini. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan model komunikasi lingkungan dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan merupakan komponen penting dalam sebuah keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove. Perencanaan komunikasi lingkungan setidaknya memiliki tahapan yaitu analisis masalah, khalayak dan penentuan tujuan; pemilihan saluran dan media komunikasi; pengembangan pesan dan produksi media; dan implementasi yang diiringi evaluasi. Model komunikasi lingkungan pengembangan ekowisata hutan bakau di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang berbasis musyawarah dan gotong-royong. Komunikasi lingkungan harus dikelola secara

terintergrasi dan kreatif dengan menggunakan berbagai metode dan saluran komunikasi.

2. Novianti, E., dkk. 2020. Jaringan Komunikasi dan Implementasinya dalam mengembangkan desa berbudaya lingkungan, (Online), Vol. 8, No. 1, (jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/24004/13416, diakses 22 Agustus 2021)

Penelitian ini menjelaskan tentang pengembangan desa berbudaya lingkungan menjadi kegiatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam melestarikan lingkungan hidup. Sungai Citarum sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat memiliki kondisi memperhatikan akibat pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah perkantoran, dan limbah industri. Limbah tersebut berdampak pada buruknya kualitas air dan tidak layak untuk digunakan dalam kegiatan sehari – hari, kondisi tersebut harus segera mungkin ditanggulangi guna mengembalikan fungsi Sungai Citarum sebagai sungai yang ramah lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata dalam mengembangkan desa berbudaya lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dan kualitatif deskriptif. Penelitian menggambarkan dampak negatif di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum yang disebabkan oleh limbah industri, perkantoran, dan rumah tangga, serta mengidentifikasi keterlibatan kelompok penggerak pariwisata dalam kegiatan desa berbudaya

lingkungan di wilayah tersebut. Pengumpulan data primer didapatkan melalui observasi, wawancara, dan angket, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Populasi mencakup seluruh kelompok penggerak pariwisata yang terlibat dalam pengembangan desa berbudaya lingkungan, sementara sampel yang diambil adalah fasilitator dan partisipan.

Teknik analisis data statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 kelompok penggerak pariwisata yang tersebar di 17 wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum, kelompok tersebut secara umum selalu melaksanakan aktivitas desa berbudaya lingkungan dengan tingkat kepuasan yang cenderung tinggi. Di sisi lain, kegiatan desa berbudaya lingkungan menjadi ajang dalam jejaring sosial antara kelompok penggerak pariwisata di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum dengan pihak eksternal.

3. Antin, T., dkk. 2017. Literasi Sampah Berbasis Komunikasi Pembangunan di Kabupaten Bantul, (Online), Vol. 15, No. 3, (jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3206/2498, diakses 22 Agustus 2021)

Penelitian ini menjelaskan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional terutama di kota-kota besar di Indonesia. Timbunan sampah dalam jumlah besar tidak saja menimbulkan masalah lingkungan tetapi juga permasalahan sosial, konflik sosial sering terjadi akibat sampah. Hal tersebut mendorong perlunya pendekatan komunikasi pembangunan

untuk mengajak masyarakat berpartisipasi mengelola sampah dengan baik sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan komunikasi pembangunan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri (JPSM) "AMOR" dalam aktivitas literasi pengelolaan sampah menuju Bantul Bersih Sampah 2019 dan Indonesia Bebas Sampah 2020.

Teori yang digunakan adalah Teori Komunikasi Pembangunan dan Ekoliterasi dari Fritjof Capra. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data; wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi sampah yang dilakukan berbasis pada pendekatan komunikasi pembangunan secara formal dan informal, mensinergikan antara top-down dan bottom-up yang didominasi oleh bentuk komunikasi antarpribadi. Tingkat literasi dalam masyarakat bervariasi dari yang rendah hingga ke level *literate* (melek sampah).

4. Zikargae, H. M., 2018. *Analysis of Environmental Communication and its Implication for Sustainable Development in Ethiopia*, (Online), 634, (www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718312075, diakses 9 Juli 2021).

Dalam penelitian ini diuraikan bahwa isu lingkungan telah menimbulkan perdebatan di seluruh dunia. Isu-isu ini juga mendapat banyak perhatian di Ethiopia karena Ethiopia telah terkena dampak buruk yang disebabkan oleh krisis lingkungan. Negara-negara berkembang dan

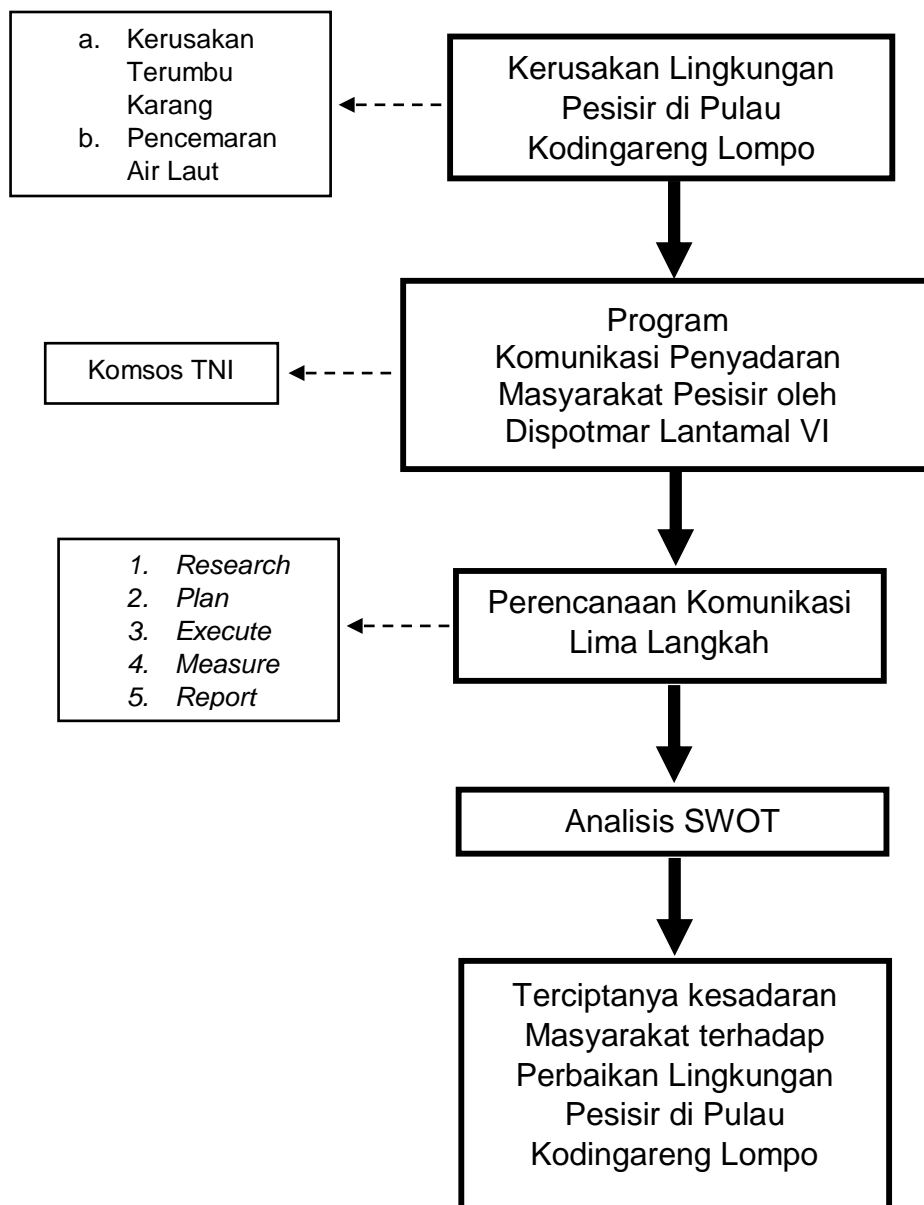
masyarakat miskin digambarkan sebagai korban perubahan iklim yang tidak menguntungkan. Penyebab perubahan iklim antara lain deforestasi, industri, kekeliruan dalam merawat lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu dampak perubahan iklim kekeringan. Kekeringan mempengaruhi banyak orang, termasuk di Etiopia. Masalah lingkungan di Ethiopia, berawal di tingkat kebijakan. Karena pihak otoritas tidak terlalu memperhatikan aspek komunikasi dalam menangani kasus-kasus lingkungan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi lingkungan Badan Perlindungan Lingkungan Negara Daerah Nasional Amhara. penelitiannya berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memilih dua teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas tidak mampu mengkomunikasikan isu-isu lingkungan yang tertuang dalam konvensi dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara otoritas dan masyarakat. Kesenjangan dan tantangan utama dalam menangani isu-isu praktis lingkungan disebabkan oleh sistem informasi lingkungan yang buruk, kurangnya penciptaan kesadaran melalui komunikasi, dan dialog publik yang lemah serta kurangnya partisipasi.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian serta tujuan penelitian, maka disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan berupa kerusakan terumbu karang dan pencemaran air laut akibat dari pembuangan sampah di laut khususnya di Pulau Kodingareng Lompo perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemangku kepentingan di bidang maritim. Oleh karena itu Pangkalan Utama TNI AL VI dalam hal ini Dinas Pembinaan Potensi Maritim sebagai *leading sector* pembinaan kemaritiman TNI AL di Makassar melaksanakan komunikasi penyadaran masyarakat pesisir dengan menerapkan Komunikasi sosial Tentara Nasional Indonesia.

Kegiatan Komsos TNI akan berjalan efektif dengan menyiapkan perencanaan dan strategi komunikasi berupa Komunikasi Lima Langkah yang terdiri dari *Research, Plan, Execute, Measure, dan Report*. Dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk mengetahui secara mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi komunikasi Dispotmar Lantamal VI dalam usaha penyadaran masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo. Oleh karena itu, dengan perencanaan komunikasi lima langkah dan analisis SWOT, Dispotmar Lantamal VI dapat mengambil langkah komunikasi yang akan mengubah sikap, perilaku, dan pengetahuan masyarakat di Pulau Kodingareng Lompo tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan akhirnya proses perbaikan lingkungan akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan khususnya di wilayah pesisir.